

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: 170/SK-4/DPRD/4/2021

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS BEBERAPA BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua DPRD Kutai Kartanegara Nomor : P-540/SET.DPRD/PPI/180/04/2022 tentang Pemberitahuan Penjelasan Raperda Berasal dari DPRD.
  - b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan:

Rapat Paripurna ke – 4 Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Senin tanggal 11 April 2022 dengan acara Pendapat Bupati Kutai Kartanegara terhadap Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara: 1) Rancangan Perda tentang Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Hukum Adat; 2) Rancangan Perda tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 3) Rancangan Perda tentang Pelindungan Petani dan Nelayan; 4) Rancangan Perda tentang Pelindungan Produk Lokal; dan Pembentukan Panitia Khusus DPRD.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

**KESATU** 

: Membentuk Panitia Khusus beberapa buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022.

**KEDUA** 

: Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

- 1. Melaksanakan tugas:
  - a. Rapat kerja dengan perangkat daerah terkait
  - b. Rapat dengan tim perumus
  - c. Konsultasi
  - d. Kajian kebijakan publik
  - e. Rapat dengar pendapat umum
    - (a) Sosialisasi
    - (b) Seminar
    - (c) Lokakarya atau diskusi publik
- 2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan atas hasil kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya.

KETIGA

: Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan kedua masa tugas Pansus maksimal 3 (tiga) bulan dan apabila melewati daripada ketentuan dimaksud Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah dapat mengusulkan tambahan waktu kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang masa tugasnya tidak melebihi dari waktu masa sidang DPRD.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara KELIMA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 11 April 2022

KETUA DEWAN PERWANUAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RUTAI KARTANEGARA,

Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong

2. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong

3. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong

4. Arsip

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR:

170/SK-4/DPRD / 4/2022 TANGGAL: 11 April 2022.

### 1. PANSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT.

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	BETARIA MAGDALENA, S.Ip., M.Si	PDI-P	KETUA
2.	M. ANDI FAISAL, S.Si	PARTAI GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	DAYANG MARISA AR, S.Sos	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
4.	MITFAUL JANAH, SE., M.Si	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
5.	JUNADI, A.Md	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
6.	FACHRUDDIN, SE	PAN	ANGGOTA
7.	H. DONI IKHWANI	NHP	ANGGOTA
8.	SARPIN	PKB	ANGGOTA
9.	H. AHMAD ZULFIANSYAH	PPP-PKS	ANGGOTA

2. PANSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS).

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	BAHARUDDIN, SE	PDI-P	KETUA
2.	BUDIMAN, S.Sos	PARTAI GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	KAMARUR ZAMAN	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
4.	IR. YUSMARDANI	PDI-P	ANGGOTA
5.	HERRY ASDAR, SE	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
6.	AGUSTINUS SUDARSONO, A.Md	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
7.	H. ABDUL WAHAB ARIEF	NHP	ANGGOTA
8.	HAMDIAH Z, S.Pd	PKB	ANGGOTA
9.	AINI FARIDA, SE	PAN	ANGGOTA
10.	MUTOYYIB	PAN	ANGGOTA

## 3. PANSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN.

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	FIRNADI IKHSAN, S.Pi	PKS-PPP	KETUA
2.	HAMDAN, A.Md	PARTAI GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	SYARIFUDDIN, S.Sos	PAN	ANGGOTA
4.	H. ACHMAD JAIS HRH, S.Sos	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
5.	H. AZHAR NURYADI, A.Md	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
6.	SOPAN SOPIAN, S.Pd	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
7.	RIA HANDAYANI	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
8.	SUGENG HARIADI	PDI-P	ANGGOTA
9.	SUYONO	PKB	ANGGOTA
10.	SA'BIR	NHP	ANGGOTA

4. PANSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PRODUK LOKAL

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. SAPARUDDIN PABONGLEAN, S.Ag	PPP-PKS	KETUA
2.	EKO WULANDANU, SH	NHP	WAKIL KETUA
3.	JOHANSYAH, SE., M.Si	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
4.	FARIDA, S.Sos	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
5.	HAIRENDRA, SE	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
6.	H. AHMAD YANI, ST, SE., M.Si	PDI-P	ANGGOTA
7.	H. ABDUL RAHMAN, SH., MH.	PDI-P	ANGGOTA
8.	MA'RUF MARJUNI, S.Pd	PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
9.	KHOIRUL MASHURI	PKB	ANGGOTA
10.	YOHANES BADULELE DA SILVA, SH., MH	PAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Tenggarong pada tanggan 19 kpr 2022

KETUA DEWANDERWAKILAN BAKYAT DAERAH KABUPATEN KARTANEGARA,

AMPHILICASID